



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2019**
Sekretariat Daerah
Kota Tasikmalaya



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta merupakan pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 ini merupakan informasi mengenai tingkat pencapaian terhadap target kinerja, keberhasilan dan atau hambatan dalam melaksanakan berbagai program/kegiatan dengan tolok ukur sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 ini belum sempurna. Sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai perbaikan penyusunan laporan ini dimasa yang akan datang.

Akhir kata kami berharap mudah-mudahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya, Maret 2020

Sekretaris Daerah,

Drs.H. Ivan Dicksan Hasannudin, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19660703 199603 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah	2
1.2.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.2 Struktur Organisasi	3
1.3 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.	6
1.4 Isu Strategis	7
1.5 Landasan Hukum.....	8
1.6 Sistematika Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	10
2.1.1 Rencana Strategis	10
2.1.1.1 Visi	11
2.1.1.2 Misi	12
2.1.2 Tujuan Dan Sasaran	13
2.1.3 Indikator Kinerja Utama	15
2.1.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	19
2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu	21
2.2.1 Rencana Strategis Hasil Reviu.....	23
2.2.2 Indikator Kinerja Hasil Reviu	24
2.2.3 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	33
3.2 Capaian Kinerja Utama	35



3.3	Perbandingan Data Kinerja Tahun Lalu	54
3.4	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya...	56
3.5	Realisasi Anggaran Tahun 2019.	58
BAB IV	PENUTUP	69



DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1	Pegawai Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Berdasar Kelompok Jabatan Tahun 2019	6
2.	Tabel 1.2	Pegawai Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Berdasar Pangkat, Golongan Tahun 2019	6
3.	Tabel 1.3	Pegawai Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Berdasar Pendidikan Terakhir Tahun 2019	7
4.	Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya	13
5.	Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019	16
6.	Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019	20
7.	Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya	22
8.	Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran Dan Kriteria Indikator Hasil Reviu Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019	25
9.	Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019	30
10.	Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019	36
11.	Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019	38
12.	Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019	40
13.	Tabel 3.4	Pencapaian Target Misi	40
14.	Tabel 3.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	40
15.	Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat	42



16. Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	43
17. Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	44
18. Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian	45
19. Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	46
20. Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran Serta Ketatalaksanaan yang baik	47
21. Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran 7 Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan	48
22. Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Sasaran 8 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan, dan Pelayanan Internal	49
23. Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Sasaran 9 Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan perundang-undangan	50
24. Tabel 3.15	Analisis Pencapaian Sasaran 10 Meningkatnya implementasi kerja sama dalam luar negeri	52
25. Tabel 3.16	Analisis Pencapaian Sasaran 11 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	53
26. Tabel 3.17	Perbandingan Data Kinerja Tahun lalu	54
27. Tabel 3.18	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57
28. Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Tahun 2019 Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya	59



DAFTAR GAMBAR

1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya 5



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang



Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

1.2.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya, menyatakan bahwa :

- a. **Kedudukan** Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah, dan Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota;
- b. **Tugas Pokok** Sekretariat Daerah membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai **fungsi** :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta Staf Ahli Wali Kota;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
 - e. penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
 - f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.



1.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Administrasi Kewilayahan;
 - b) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Kerjasama Daerah;
2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengaturan;
 - b) Sub Bagian Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Bina Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - c) Sub Bagian Bina Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Kebudayaan;

c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan

1. Bagian Perekonomian, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha;
 - b) Sub Bagian Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c) Sub Bagian Produksi dan Industri;
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kewilayahan, Sosial dan Budaya;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;



3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan :

- a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa;
- b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;

d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:

1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

- a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat;

2. Bagian Umum, membawahkan :

- a) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi;
- b) Sub Bagian Perlengkapan;
- c) Sub Bagian Rumah Tangga;

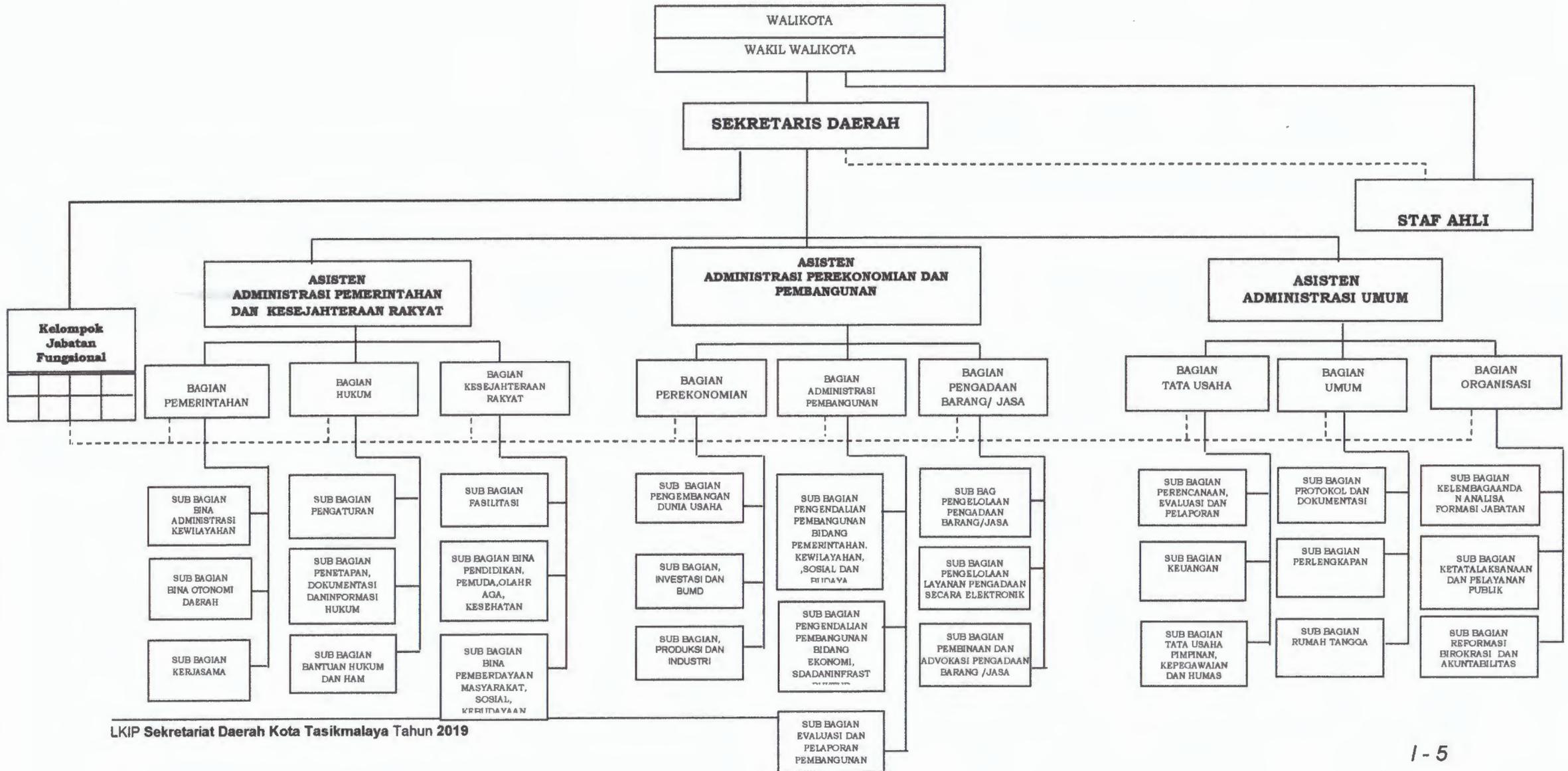
3. Bagian Organisasi, membawahkan :

- a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;
- b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
- c) Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA





1.3 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Sumberdaya manusia menjadi aspek strategis untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya. Hingga saat ini, Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya didukung oleh 156 tenaga PNS, dan 1 (Satu) Orang TKK dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Pegawai Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Berdasarkan Kelompok Jabatan Tahun 2019

No.	Kelompok Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon IIB	1	-	1
2.	Eselon IIB	5	-	5
3	Eselon IIIA	9	-	9
5.	Eselon IVA	21	6	27
6.	Staf/Pelaksana	32	80	112
7.	Jabatan Fungsional	1	1	2
8.	TKK	1	-	1
JUMLAH TOTAL		70	87	157

Sumber : Subbagian Tata usaha Pimpinan, Kepegawaian Dan Humas

Tabel 1.2.

Pegawai Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Golongan Tahun 2019

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	14	-	14
2.	Golongan III	66	31	97
3.	Golongan II	35	8	430
4.	Golongan I	2	-	2
JUMLAH TOTAL		117	39	156

Sumber : Subbagian Tata usaha Pimpinan, Kepegawaian Dan Humas



Tabel 1.3.
Pegawai Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2019

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	MAGISTER (S2)	22	3	25
2.	SARJANA (S1)	51	23	74
3.	D IV	9	2	11
4.	D III	4	3	7
5.	SLTA	31	6	37
6.	SLTP	3	-	3
7.	SD	-	-	-
JUMLAH TOTAL		120	37	157

Sumber : Subbagian Tata usaha Pimpinan, Kepegawaian Dan Humas

1.4 ISU STRATEGIS

1. Kualitas sumber daya aparatur yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya, dan peningkatan kuantitas sumber daya aparatur yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian, serta pemerataan habis pembagian tugas perlu disosialisasikan;
2. Dinamika regulasi yang terus berubah dalam waktu yang relatif singkat sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu program/kegiatan;
3. Semakin kompleks dan beragamnya aktivitas yang harus dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya serta tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang maksimal, transparan dan akuntabel;
4. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan SDM yang memadai;
5. Struktur Organisasi yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika regulasi.

1.5 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut



:Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 181);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 190);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
12. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya



Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 4);

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang Gambaran Umum Sekretariat Daerah, Tugas, Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Sekretariat Daerah, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematis.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah revidi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM REVIU

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 050/Kep.1486 -Tata Usaha dan Humas/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan SKPD



untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Tasikmalaya dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Tasikmalaya yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Adapun visi Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 adalah :

" Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani "

Rumusan visi tersebut dapat dimengerti melalui makna yang terkandung melalui konsep-konsep sebagai berikut :

- Religius** : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.
- Maju** : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.
- Madani** : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

2.1.1.2 Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan



untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi

Adapun Misi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Misi I : Mewujudkan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Dan Berkearifan Lokal

Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan serta berpegang teguh pada tata nilai, norma, moral, dan agama serta memiliki akhlaq dan karakter yang baik dan mulia. Menjaga dan memelihara kearifan lokal dan kebudayaan daerah yang baik dan luhur.

Misi 2 : Mengurangi Tingkat Kemiskinan Dan Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk terus mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Memperkuat kondisi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengurangi kesenjangan, pengurangan pengangguran memperkuat daya saing pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan dan potensi lokal, peningkatan sarana prasarana perekonomian, membuka investasi dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, peningkatan akses untuk permodalan dan pemasaran, sehingga kondisi perekonomian dan daya beli serta daya saing masyarakat meningkat, tumbuh dan merata.

Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah



daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat Daerah Tahun 2017 - 2022 sebanyak 11 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya sebagai berikut :

**Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pengembangan Perekonomian, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti program magrib mengaji.	70	75	80	85	90
			Tingkat implementasi kehidupan masyarakat yang religius.	63	65	68	74	75
			Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan.	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal.	0	100	100	100	100



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
2	Meningkatkan Pengembangan Perekonomian, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian	Persentase Implementasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Pelayanan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat \geq Kategori Baik	50	55	60	65	70
			Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik Baik	500	55	60	65	70
		Meningkatnya Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran Serta Ketatalaksanaan yang Baik	Persentase Perangkat Daerah yang Tatalaksananya baik	0	55	60	70	80
			Nilai Evaluasi Kelembagaan	0	0	75	0	82
4	Meningkatkan pengendalian pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan	100	100	100	100	100
			Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PBJ melalui ULP	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan, dan Pelayanan Internal	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	100	100	100	100	100
			Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	70	80	80	90	90
			Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah	100	100	100	100	100
			Maturitas SPIP Perangkat Daerah	0	1	1	2	3



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
			Persentase penanganan masalah hukum	20	20	20	20	20
			Persentase naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP sesuai target Daerah	0	66	66	66	100
			Persentase Perangkat Daerah dengan Dokumen LPPD sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100
			Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	100	100	100	100	100
			Persentase Kelurahan Berkinerja Baik	100	100	100	100	100
			Persentase Kinerja Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal	100	100	100	100	100

2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Tasikmalaya dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017 – 2022, melalui Keputusan Walikota Nomor : /Kep. 342-Bappelitbangda/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti program magrib mengaji.	%	Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya (Lembar Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156)	Jumlah siswa muslim yang mengikuti program / Jumlah siswa muslim jenjang pendidikan dasar	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	Tingkat Implementasi Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang religius	Tingkat Implementasi Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius	%	Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya (Lembar Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156)	Capaian Implementasi Tata Nilai (sesuai Perda No.7 Th 2014)	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	%	1. Untuk Memfasilitasi Kegiatan Keagamaan Dalam Upaya Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat 2. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya (Lembar Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156)	Realisasi Fasilitasi Kegiatan Keagamaan terhadap yang ditargetkan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
3	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	Presentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengembangan budaya local	%	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pelestarian, Perlindungan Dan Pengembangan Seni Budaya Di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 235)	Realisasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal terhadap yang ditargetkan	Bagian Kesejahteraan Rakyat



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
4	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	%	Mengukur Implementasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Realisasi Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
5	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian	Persentase implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan pembinaan dunia usaha, sumber daya alam dan pertanian	%	Mengukur Implementasi Kebijakan Bidang Dunia Usaha, Sumber Daya Alam, Pertanian.	Realisasi Implementasi Kebijakan pembinaan dunia usaha, sumber daya alam dan pertanian	Bagian Perekonomian
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat > Kategori Baik	%	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Jumlah total dari nilai persepsi per unsur/Jumlah total unsur yang terisi x Nilai Penimbang, dengan kategori capaian kinerja : 1. 25,00 – 64,99 Point = Tidak Baik 2. 65,00 – 76,60 Point = Kurang Baik 3. 76,61 – 88,30 Point = Baik 4. 88,31 – 100 Point = Sangat Baik	Bagian Organisasi
		Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik Baik	%	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik Baik	Bagian Organisasi



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
		Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah.	Kategori	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Bagian Tata Usaha dan Humas
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah	Bagian Tata Usaha dan Humas
10	Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	%	1. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 3. Perpres 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Peraturan Menkumham No. 20 Tahun 2015 tentang Tata cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Produk Hukum yang harmonis/ sinkron dibanding dengan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Perundang-undangan
11	Meningkatnya implementasi kerja sama dalam dan luar negeri.	Persentase naskah kerja sama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan.	%	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 363-372; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri	Bagian Banhuk dan Kerjasama Daerah



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP sesuai dengan target daerah.	%	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		

2.1.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 mengacu pada Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti program magrib mengaji.	71
		Tingkat implementasi kehidupan masyarakat yang religius.	63
		Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan.	100
2	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	Presentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengembangan budaya lokal	0
3	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	Presentase implementasi kebijakan jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat	100
4	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian	Presentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan pembinaan dunia usaha, sumberdaya alam dan pertanian	100
5	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	Persentase perangkat daerah dengan nilai hasil survei kepuasan masyarakat lebih dari kategori baik.	50
		Persentase perangkat daerah dengan kinerja pelayanan publik baik.	50
6	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian	Persentase perangkat daerah yang tata laksanaanya baik.	50
		Nilai evaluasi kelembagaan.	68
7	Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan.	Persentase PD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan.	100
		Persentase PD yang melaksanakan PBJ melalui ULP.	100
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan, dan Pelayanan Internal	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP.	Baik
		Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah.	B
		Indeks kepuasan layanan internal sekretariat daerah.	100
		Maturitas SPIP perangkat daerah	1
9	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan perundang-undangan.	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan.	100



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase penanganan masalah hukum.	0
10	Meningkatnya implementasi kerja sama dalam luar negeri.	Persentase naskah kerja sama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan.	100
		Persentase naskah kerja sama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan.	100
11	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	Persentase PD dengan dokumen LPPD sesuai ketentuan.	100
		Persentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik.	100
		Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP sesuai dengan target daerah.	33

Adapun jumlah keseluruhan anggaran Tahun 2019 adalah Rp. 66.582.180.025 (Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah), sedangkan untuk belanja langsung sebesar RP. 42.583.536.175,00 (Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) untuk mendukung program/ kegiatan yang diperjanjikan.

2.2 PERENCANAAN STRATEGIS HASIL REVIU

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2019, sebagai berikut :

2.2.1 Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Sekretariat Daerah terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan



maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2017.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2017 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya Tata Nilai Kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius serta pelestarian budaya daerah	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti program magrib mengaji.	%	70	75	80	85	90
		Meningkatnya Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	Persentase perangkat daerah dengan nilai hasil survei kepuasan masyarakat lebih dari kategori baik.	%	50	55	60	65	70
		Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat	Tingkat implementasi kehidupan masyarakat yang religius.	%	63	65	68	74	75
			Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan.	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	Persentase perangkat daerah dengan kinerja pelayanan publik baik.	%	50	55	60	65	70



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
		Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian	Persentase perangkat daerah yang tata laksananya baik.	Nilai	50	55	60	70	80
			Nilai evaluasi kelembagaan.	Nilai	68	0	75	0	82
2	Meningkatkan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan.	Persentase PD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan.	%	100	100	100	100	100
			Persentase PD yang melaksanakan PBJ melalui ULP.	%	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah.	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan perundang-undangan.	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan.	%	100	100	100	100	100
			Persentase penanganan masalah hukum.	Kasus	0	5	5	5	5
		Meningkatnya implementasi kerja sama dalam luar negeri.	Persentase naskah kerja sama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan.	%	100	100	100	100	100
			Persentase naskah kerja sama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan.	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	Persentase PD dengan dokumen LPPD sesuai ketentuan.	%	100	100	100	100	100
			Persentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik.	%	100	100	100	100	100
			Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP sesuai dengan target daerah.	%	33	66	66	66	100



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
4	Meningkatkan Pengembangan Perekonomian, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	Presentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengembangan budaya lokal	%	0	100	100	100	100
		Meningkatnya Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	Presentase implementasi kebijakan jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian	Presentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan pembinaan dunia usaha, sumberdaya alam dan pertanian	%	100	100	100	100	100
5	Meningkatkan tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan, dan Pelayanan Internal	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP.	Kategori	Baik	100	100	100	100
			Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah.	Kategori	B	BB	BB	A	A
			Indeks kepuasan layanan internal sekretariat daerah.	%	100	100	100	100	100
			Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1	2	2	3
6	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	Persentase Kinerja Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal	%	100	100	100	100	100

2.2.2 Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
1	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti program magrib mengaji.	%	Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya (Lembar Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156)	Jumlah siswa muslim yang mengikuti program / Jumlah siswa muslim jenjang pendidikan dasar x 100 %	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		Tingkat Implementasi Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius	%	Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya (Lembar Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156)	Prosentase Hasil Survei Implementasi Tata Nilai (Sesuai Perda No.7 Thn 2014)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan.	%	1. Untuk Memfasilitasi Kegiatan Keagamaan Dalam Upaya Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat 2. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya (Lembar Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156)	Realisasi Fasilitasi Kegiatan Keagamaan terhadap yang ditargetkan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	%	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pelestarian, Perlindungan Dan Pengembangan Seni Budaya Di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 235)	Realisasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal terhadap yang ditargetkan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	



Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
3	Meningkatkan Implementasi Kebijakan jaminan dan perlindungan social serta pemberdayaan Masyarakat	Persentase Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	%	Mengukur Implementasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Realisasi Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
4	Meningkatkan Implementasi Kebijakan jaminan dan perlindungan social serta pemberdayaan Masyarakat	Persentase implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan pembinaan dunia usaha, sumber daya alam dan pertanian	%	Mengukur Implementasi Kebijakan Bidang Dunia Usaha, Sumber Daya Alam, Pertanian.	Realisasi Implementasi Kebijakan pembinaan dunia usaha, sumber daya alam dan pertanian	Bagian Perekonomian	
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat > Kategori Baik	%	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Jumlah total dari nilai persepsi per unsur/Jumlah total unsur yang terisi x Nilai Penimbang, dengan kategori capaian kinerja : 1. 25,00 – 64,99 Point = Tidak Baik 2. 65,00 – 76,60 Point = Kurang Baik 3. 76,61 – 88,30 Point = Baik 4. 88,31 – 100 Point = Sangat Baik	Bagian Organisasi	
		Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik Baik	%	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik Baik	Bagian Organisasi	
6	Meningkatnya Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran Serta Ketatalaksanaan yang Baik	Persentase Perangkat Daerah yang Tatalaksananya Baik	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	Hasil survey	Bagian Organisasi	



Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
7	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan	%	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Realisasi Pembangunan pada tgl 10 bulan berikutnya/ jumlah Perangkat Daerah x 100	Bagian Administrasi Pembangunan	
		Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PBJ melalui ULP	%	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Jumlah Usulan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dari Perangkat Daerah melalui ULP	Bagian Administrasi Pembangunan	
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan, dan Pelayanan Internal	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	%	1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.	Realisasi Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	Bagian Tata Usaha dan Humas	
		Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Ktgr	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Bagian Tata Usaha	
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah	Bagian Tata Usaha	



Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
9	Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	%	1. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 3. Perpres 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Peraturan Menkumham No. 20 Tahun 2015 tentang Tata cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Produk Hukum yang harmonis/sinkron dibanding dengan Peraturan Perundang Undangan	Bagian Perundang-undangan	
10	Meningkatnya Implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Naskah Kerjasama Aktif Lingkup Dalam Negeri yang Diimplementasikan	%	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 363-372; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri	Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama Daerah	
11	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Dokumen LPPD sesuai Ketentuan	%	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 Ayat (1), menegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota	Persentase Perangkat Daerah dengan Dokumen LPPD sesuai Ketentuan	Bagian Pemerintahan	



Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
		Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;	Jumlah Kecamatan yang berkinerja baik dibandingkan Jumlah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dikalikan 100%	Bagian Pemerintahan	
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Sesuai Target Daerah	%	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP lebih atau sama dengan target saking daerah	Bagian Organisasi	



2.2.3 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Sekretaris Daerah dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti program magrib mengaji.	%	70
2	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	Persentase perangkat daerah dengan nilai hasil survei kepuasan masyarakat lebih dari kategori baik.	%	50
3	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat	Tingkat implementasi kehidupan masyarakat yang religius.	%	63
		Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan.	%	100
4	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	Persentase perangkat daerah dengan kinerja pelayanan publik baik.	%	50
5	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian	Persentase perangkat daerah yang tata laksananya baik.	Nilai	50
		Nilai evaluasi kelembagaan.	Nilai	68
6	Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan.	Persentase PD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan.	%	100
		Persentase PD yang melaksanakan PBJ melalui ULP.	%	100
7	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan perundang-undangan.	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan.	%	100
		Persentase penanganan masalah hukum.	Kasus	0
8	Meningkatnya implementasi kerja sama dalam luar negeri.	Persentase naskah kerja sama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan.	%	100
		Persentase naskah kerja sama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan.	%	100



O	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
9	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	Persentase PD dengan dokumen LPPD sesuai ketentuan.	%	100
		Persentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik.	%	100
		Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP sesuai dengan target daerah.	%	33
10	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	Presentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengembangan budaya lokal	%	0
11	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	Presentase implementasi kebijakan jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat	%	100
12	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian	Presentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan pembinaan dunia usaha, sumberdaya alam dan pertanian	%	100
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan, dan Pelayanan Internal	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP.	Kategori	Baik
		Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah.	Kategori	B
		Indeks kepuasan layanan internal sekretariat daerah.	%	100
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis



dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Merah
2	Baik	75.00 – 89.99	Merah
3	Cukup	65.00 – 74.99	Merah
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan



visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 050/Kep.037/Tata Usaha/2019, telah ditetapkan sebanyak 11 sasaran dan sebanyak 25 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 7 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 8 terdiri dari 4 indikator
- Sasaran 9 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 10 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 11 terdiri dari 5 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 050/Kep.037/Tata Usaha /2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Tasikmalaya. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti program magrib mengaji	%	75,00	90,00	120
2	Tingkat Implementasi Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius	%	65,00	87,00	133,85
3	Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	%	100,00	100,00	100
4	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	%	100,00	100,00	100
5	Persentase Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Implementasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian	%	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat \geq Kategori Baik	%	55,00	99,09	182,00
8	Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik Baik	%	55,00	84,21	153,09
9	Persentase Perangkat Daerah yang Tatalaksananya baik	Nilai	50,00	50,00	100,00
10	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan	%	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PBJ melalui ULP	%	100,00	100,00	100,00
12	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	%	100,00	100,00	100,00
13	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100
14	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1	2,54	254



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
15	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	%	100	163,88	163,88
16	Persentase Naskah Kerjasama Aktif Lingkup Dalam Negeri yang Diimplementasikan	%	100	366,67	366,67
17	Persentase Perangkat Daerah dengan Dokumen LPPD sesuai Ketentuan	%	100,00	100,00	100,00
18	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	100,00	100,00	100,00
19	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP sesuai target Daerah	Ktgr	66	44,73	67,77

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun anggaran 2019 terdiri dari 7 (Tujuh) indikator dengan katagori/Interpretasi sangat baik atau capaian melebihi target, 11 (Sebelas) Indikator sesuai target dan 1 indikator capaiannya dibawah target. Capaian Indikator yang melebihi target yaitu indikator Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti program magrib mengaji dari target 75 % realisasi 90 % dimana capainnya 120 %, indikator Tingkat Implementasi Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius target 65 % realisasi 87 % capaian 133,85, Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat \geq Kategori Baik dari target 55% realisasi 99,09% capaian 182%, Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik Baik dari target 55% realisasi 84,21% dimana capaiannya 153,09%, Indikator Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah dari target 1 level realisasi 2,54 level dimana capaiannya 254%, Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dari target 100% realisasi 163,88% dimana capaiannya 163,88% , Indikator Persentase Naskah Kerjasama Aktif Lingkup Dalam Negeri yang Diimplementasikan dari target 100% realisasi 366,67% dimana capaiannya 366,67%. Hanya untuk indikator Persentase naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri capainnya digabungkan dengan Kerjasama Daerah lainnya, sesuai peraturan pemerintah dan juga efisiensi anggaran.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukan pada indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP sesuai target



Daerah target 66 kategoril sedangkan realisasinya 44,73 dimana capaiannya 67,77%, indikator ini tidak dapat tercapai karena Tidak ada kegiatan pendukung. Demikian pula dengan Indikator kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017 - 2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 sebanyak 11 sasaran dengan 25 indikator yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti program magrib mengaji	%	75	90	120
2	Tingkat Implementasi Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius	%	65	87	133,85
3	Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	%	100	100	100
4	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	%	100	100	100
5	Persentase Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100
6	Persentase Implementasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian	%	100	100	100
7	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat \geq Kategori Baik	%	55,00	99,09	182
8	Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik Baik	%	55,00	84.21	153,09
9	Persentase Perangkat Daerah yang Tatalaksananya baik	Nilai	50	50	100



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
10	Nilai Evaluasi Kelembagaan	-	-	-	-
11	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan	%	100	100	100
12	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PBJ melalui ULP	%	100	100	100
13	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	%	100	100	100
14	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B	100
15	Indeks Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah	%	100	79,33	79
16	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1	2,54	2,54
17	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	%	100	163,88	163,88
18	Persentase penanganan masalah hukum	Kasus	5	10	200
19	Persentase Naskah Kerjasama Aktif Lingkup Dalam Negeri yang Diimplementasikan	%	100	366,67	333
20	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan	-	-	-	-
21	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP sesuai target Daerah	Ktgr	66	44.73	67,77
22	Persentase Perangkat Daerah dengan Dokumen LPPD sesuai Ketentuan	%	100	100	100
23	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	100	100	100
24	Persentase Kelurahan Berkinerja Baik	%	100	100	100
25	Persentase Kinerja Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal	%	100	100	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Perangkat Daerah pada beberapa tabel berikut :



Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	39,13 %
2	Sesuai Target	56,52 %
3	Tidak Mencapai Target	4,34%

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:
Dari sebanyak 11 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	4	2	8,00	2	8,00	0	0,00
2	Misi 2	4	2	0,00	2	0,00	0	0,00
3	Misi 3	15	4	12,00	10	52,00	1	12,00
	Jumlah	23	8	34,78	14	60,87	1	4,34

Dari sebanyak 11 sasaran dengan sebanyak 25 indikator kinerja, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	4	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	8,00 %
2	Sesuai Target	2	8,00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0,00 %
B.	Misi 2	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0,00 %
2	Sesuai Target	2	4,00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0,00 %



No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
C.	Misi 3	19	
1	Melebihi/Melampaui Target	7	12.00 %
2	Sesuai Target	9	52.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	4.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 11 sasaran dan sebanyak 25 indikator kinerja dari sebanyak 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2017 - 2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :



Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai
Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti program magrib mengaji.	%	70,00	100,00	142.86	75	89,56	119,41
2	Tingkat implementasi kehidupan masyarakat yang religius.	%	63	70,00	111.11	65	86,92	133,72
3	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan.	%	100	65,00	65	100	100	100,00

Sasaran Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti program magrib mengaji." adalah sebesar 89,56 dari target sebesar 75,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 119.41 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti program magrib mengaji." tahun ini adalah sebesar 119,41 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 99,51%.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Tingkat implementasi kehidupan masyarakat yang religius." adalah sebesar 86,92 dari target sebesar 65 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 133.72 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 2 "Tingkat implementasi kehidupan masyarakat yang religius." tahun ini adalah sebesar 133,72 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 75,00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan." adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan



dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini telah mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 3 "Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan." tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

Sasaran 2	
Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Presentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengembangan budaya lokal	%	0,00	0,00	0.00	100	100	100

Sasaran Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Presentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengembangan budaya lokal" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini telah mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Presentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengembangan budaya lokal" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

Sasaran 3	
Meningkatnya Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	



Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam table di bawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial
Serta Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Presentase implementasi kebijakan jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100.00	100	100,00	100.00

Sasaran Meningkatkan Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Presentase implementasi kebijakan jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat " adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini telah mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Presentase implementasi kebijakan jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Sasaran 4

Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :



Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber
Daya Alam dan Pertanian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Presentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan pembinaan dunia usaha, sumber daya alam dan pertanian	%	100,00	83,00	83.00	100	100	100.

Sasaran Meningkatkan Implementasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Sasaran Meningkatkan Implementasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Presentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan pembinaan dunia usaha, sumberdaya alam dan pertanian " adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Presentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan pembinaan dunia usaha, sumberdaya alam dan pertanian " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Sasaran 5

Meningkatnya kualitas pelayanan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :



Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase perangkat daerah dengan nilai hasil survei kepuasan masyarakat lebih dari kategori baik.	%	100	100	100,00	100	100	100
2	Persentase perangkat daerah dengan kinerja pelayanan publik baik.	%	100	93,83	93,84	55	84,21	153,10

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Sasaran Meningkatnya Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase perangkat daerah dengan nilai hasil survei kepuasan masyarakat lebih dari kategori baik." adalah sebesar 99,09% dari target sebesar 55.00 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 182.00%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase perangkat daerah dengan nilai hasil survei kepuasan masyarakat lebih dari kategori baik." tahun ini adalah capaiannya sebesar 182.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kerjanya melebihi target.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase perangkat daerah dengan kinerja pelayanan publik baik." adalah sebesar 84,21% dari target sebesar 55 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 153,21%, capaian ini telah melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase perangkat daerah dengan kinerja pelayanan publik baik." tahun



ini adalah sebesar 55.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 84,21%.

Sasaran 6
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran Serta Ketatalaksanaan yang Baik

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 6
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran
Serta Ketatalaksanaan yang baik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase perangkat daerah yang tata laksananya baik.	Nilai	100	100	100.00	50,00	50,00	100.00
2	Nilai evaluasi kelembagaan.	Nilai	0	0	0	0	0	0

Sasaran Meningkatkan Meningkatkan Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran Serta Ketatalaksanaan yang Baik dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase perangkat daerah yang tata laksananya baik." adalah sebesar dari target sebesar 50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 50.00 %, capaian ini telah mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase perangkat daerah yang tata laksananya baik." tahun ini adalah sebesar 50.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Nilai evaluasi kelembagaan." adalah sebesar 0 dari target sebesar 0 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, tidak ada target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 2 "Nilai evaluasi kelembagaan." tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila



dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya 0.00 %.

Sasaran 7

Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan.

Pencapaian sasaran 7 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 7
Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase PD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan.	%	100	100	100.00	100,00	100,00	100.00
2	Persentase PD yang melaksanakan PBJ melalui ULP.	%	100	100	100.00	100,00	100,00	100.00

Sasaran Meningkatkan kualitas administrasi pembangunan. dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase PD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan." adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini telah mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase PD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan." tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase PD yang melaksanakan PBJ melalui ULP." adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 2 "Persentase PD yang melaksanakan PBJ melalui ULP." tahun ini adalah



sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

Sasaran 8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan, dan Pelayanan Internal

Pencapaian sasaran 8 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran 8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan, dan
Pelayanan Internal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP.	%	100	100	1000.00	100,00	100,00	100.00
2	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah.	Kategori	70	n/a	0.00	B	B	100.00
3	Indeks kepuasan layanan internal sekretariat daerah.	%	80	102	127.50	100	79,33	100.00
4	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	0	0	0.00	1	2,54	250.00

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan, dan Pelayanan Internal dapat dilihat dari sebanyak 4 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP." adalah sebesar dari target sebesar Baik yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP." tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah." Adalah B dengan nilai 65,71 dari target B yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga capaian kerjanya mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah." tahun adalah sebesar B, bila



dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai A.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Indeks kepuasan layanan internal sekretariat daerah." adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini telah mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks kepuasan layanan internal sekretariat daerah." tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Maturitas SPIP perangkat daerah " adalah sebesar dari target sebesar 1 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini telah mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Maturitas SPIP perangkat daerah " tahun ini adalah sebesar 1 Level , bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 3 Level.

Sasaran 9
Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan perundang-undangan.

Pencapaian sasaran 9 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Sasaran 9
Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum
Daerah yang sesuai dengan Perundang-Undangan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan.	%	100	189	189.00	100	163,88	163,88
2	Persentase penanganan masalah hukum.	%	20	16	80.00	5	10	200



Sasaran Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan perundang-undangan.dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan." adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 163,88%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan." tahun ini adalah sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase penanganan masalah hukum." adalah sebesar dari target sebesar 5 kasus realisasi 20 kasus yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 200%, capaian ini melebihi target capaian yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase penanganan masalah hukum." tahun ini adalah sebesar 5 Kasus bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai200.00 %. Pada Tahun ke dua target indikator Persentase penanganan masalah hukum sudah melebihi dari target akhir tahun Renstra.

Sasaran 10

Meningkatnya implementasi kerja sama dalam luar negeri.

Pencapaian sasaran 10 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :



Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Sasaran 10
Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Dalam Luar Negeri.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase naskah kerja sama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan.	%	100	250	250.00	100	367	367
2	Persentase naskah kerja sama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan.	%	100	100	100.00	100	0	0.00

Sasaran Meningkatnya implementasi kerja sama dalam luar negeri. dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase naskah kerja sama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan." adalah sebesar dari target sebesar 367 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 367.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase naskah kerja sama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan." tahun ini adalah sebesar 367.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase naskah kerja sama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan." adalah sebesar dari target sebesar 0 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase naskah kerja sama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan." tahun ini adalah sebesar 0.00 %, hal ini dikarenakan ada peraturan Pemerintah yang menyatakan harus digabungkan dengan naskah kerjasama aktif dalam negeri dan juga ada efisiensi anggaran.

Sasaran 11

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Pencapaian sasaran 11 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Sasaran 11
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase PD dengan dokumen LPPD sesuai ketentuan.	%	3	3,12	103.95	100	100,00	100.00
2	Persentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik.	%	100	n/a	0.00	100	100,00	100.00
3	Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP sesuai dengan target daerah.	%	75	62,85	83.80	66	44,73	67.77
4	Persentase Kinerja Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal	%	100	100	100.00	100	100	0.00

Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. dapat dilihat dari sebanyak 4 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase PD dengan dokumen LPPD sesuai ketentuan." adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase PD dengan dokumen LPPD sesuai ketentuan." tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik." adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 2 "Persentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik." tahun ini adalah



sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP sesuai dengan target daerah." adalah sebesar dari target sebesar 66% katagori Baik yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah katagori 67,77, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 3 "Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP melebihi dari target daerah. " tahun ini adalah sebesar Katagori 67,77, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kerjanya mencapai Katagori A.

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Persentase Kinerja Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal" adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 4 "Persentase Kinerja Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

3.3 Perbandingan Data Kinerja Tahun Lalu

Sekretariat Daerah dalam capaian kinerja ada beberapa indikator yang mencapai kinerja melampaui yang ditargetkan. Pada Tahun 2018 merupakan tahun akhir RPJMD periode tahun 2013 – 2017. Sedangkan tahun 2019 merupakan transisi dari masa RPJMD 2013-2017 dan RPJMD tahun 2017-2022. Adapun perbandingan pencapaian target dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 dapat dilihat pada table 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Data Kinerja Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti program magrib mengaji.	%	70,00	100,00	142.86	75	89,56	119,41



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	%	Tahun 2019	%		
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan.	%	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00
1		%	0,00	0,00	0,00	100	100	100,00
1	Presentase implementasi kebijakan jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat	%	100	89,00	89,00	100	100,00	100,00
1	Presentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan pembinaan dunia usaha, sumberdaya alam dan pertanian	%	100	75,00	75,00	100	100,00	100,00
1	Persentase perangkat daerah dengan nilai hasil survei kepuasan masyarakat lebih dari kategori baik.	%	50	50	50,00	77-78	79,17	Baik
8	Persentase perangkat daerah dengan kinerja pelayanan publik baik.	%	50	50	100,00	55,00	84,21	153.10
9	Persentase perangkat daerah yang tata laksananya baik.	%	50	50	100	50,00	50,00	100,00
10	Nilai evaluasi kelembagaan.	Nilai	0	0	0	0	0	0
11	Persentase PD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan.	%	100	100	100	100,00	100,00	100,00
12	Persentase PD yang melaksanakan PBJ melalui ULP.	%	100	100	100	100,00	100,00	100,00



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	%	Tahun 2019	%		
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
14	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah.	Nilai	70	n/a	0.00	B	B	B
15	Indeks kepuasan layanan internal sekretariat daerah.	%	100	100	100.00	100,00	100,00	100,00
16	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	2,5	250.00	1	2,5	250,00
17	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan.	%	100	100	100,00	100,00	163,88	163,88
18	Persentase penanganan masalah hukum.	%	20	64	320,00	100,00	200,00	200,00
19	Persentase naskah kerja sama aktif lingkup dalam negeri yang diimplementasikan.	%	100	100	100,00	100	366,67	366,67
20	Persentase naskah kerja sama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan.	%	100	100	100	100	0	0.00
21	Persentase PD dengan dokumen LPPD sesuai ketentuan.	%	100	100,00	100.00	100	100,00	100,00
22	Persentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik.	%	100	100	100,00	100	100	100,00
23	Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP sesuai dengan target daerah.	%	62,85	70,21	111,11	66	44,73	67.77
24	Persentase Kinerja Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal	%	100	100	100	100	100	100

3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja dicapai atas dasar penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Di dalam



penggunaan sumber daya tersebut, terutama anggaran, prinsip efisiensi wajib diterapkan sebagai bagian penyelenggaraan *good and clean governance*. Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dihitung dengan mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Perhitungan diterapkan hanya pada kinerja dengan pencapaian lebih dari dan sama dengan 100%. Asumsi yang diterapkan adalah capaian kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang minimal, maka efisiensi telah terjadi.

Tabel 3.18
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

No	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	97.7	2,3 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	94.76	5,24 %
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	99.94	0,6 %
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	84.71	5,29 %
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	97.74	2,26 %
6	Program Perencanaan Kerja	100 %	99.54	0,46 %
7	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100%	98.92	0,8 %
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	98.36	1,64 %
9	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100 %	94.00	6 %
10	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	100 %	98.73	1,27 %
11	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100 %	99.08	0,92 %
12	Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	100 %	91.37	8,63 %
13	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	100 %	99.12	0,88 %
14	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	100 %	73.45	26,55%
15	Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	26.32 %	95.73	4,27%



No	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
16	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	100 %	96.37	3,63 %
17	Program Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 %	88.01	11,99 %
18	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	100 %	94.83	5,17 %
19	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100 %	97.54	2,46 %
20	Program Peningkatan Pelayanan Publik	55 %	45.25	9,75 %
21	Program Pemenuhan, Pemeliharaan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	100 %	83.55	16,45 %
22	Program Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	100 %	97.01	2,99 %
23	Program Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Daerah	100%	96.82	3,18
24	Program Fasilitasi Tasik Bersedekah	100%	89.18	10,82
25	Program Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan dan Kelembagaan	100 %	80.58	19,42 %
26	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	97.69	2,31 %
27	Program Fasilitasi Maghrib Mengaji	100%	81.81	18,19
	JUMLAH	100	95.13	4.87

3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2019

Pada tahun 2019 Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tak lepas dari dukungan anggaran untuk menunjang pencaian target sasaran program dan kegiatan. Tahun anggaran 2019 Sekretariat Daerah mendapat alokasi dana sebesar Rp. 42.583.536.175,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.508.697.843,00 atau realisasi sebesar 95,13 %. Sisa anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.074.838.332,00 atau 4,87 % merupakan Silpa Tahun Anggaran 2019.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019. Pembuatan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya menetapkan sebanyak 11 (Sebelas) sasaran dengan 25 (Dua Puluh Lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai capaian 1 (Satu) indikator 119,41 % dan 1 (satu) Indikator 133,85 % dan 1(Satu) indikator 100%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100,00 % dan 153,10%
- Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100,00% dan 0 %
- Sasaran 7 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100,00 %
- Sasaran 8 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 2 (Dua) Indikator 100,00 % , Satu B, 1 (Satu) level 2,54.
- Sasaran 9 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100,00 % dan 320,00%
- Sasaran 10 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100,00 % dan 0%
- Sasaran 11 terdiri dari 5 indikator dengan nilai 3 (Tiga) Indikator 100,00 % dan satu indikator 67,77%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 11 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

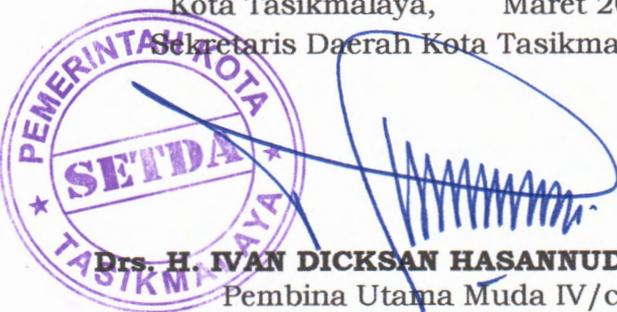


Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 42,583,536,175.00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 40,508,697,843.00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.074.838.332,00

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 40,508,697,843.00 (Empat Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya adalah 95.13 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya telah dioptimalkan secara efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Tasikmalaya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya, Maret 2020
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, ✓



Drs. H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19660703 199603 1 002